



LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKT)

TAHUN 2017



DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG
JI. AHMAD YANI NO. 76 TELP. (0562) 636331
SINGKAWANG - 79123

KATA PENGANTAR

Penyusunan LKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang ini adalah merupakan wujud tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi dinas atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017, selain itu LKT juga merupakan alat kendali dan alat penilai kinerja baik dalam lingkup internal pemerintah maupun lingkup eksternal. Dalam lingkup internal LKT merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas pada tahun anggaran 2017 dan evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dalam lingkup eksternal merupakan wujud pertanggung jawaban dinas kepada *stake holders* (Walikota, DPRD dan Publik).

Dalam pencapaian hasil kinerja tahunan ini sudah barang tentu membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh staf yang secara operasional maupun fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan program/ kegiatan di bidangnya masing – masing, serta tidak terlepas pula dari adanya dukungan dan kerja sama dari masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Dalam penyusunan LKT ini disadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Karena itu berbagai masukan baik saran maupun kritik yang positif sangat dihargai untuk kesempurnaannya di masa mendatang.

Singkawang, Februari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Singkawang

Drs. AHYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631123 199003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
LAMPIRAN	vi
LAMPIRAN I Saran dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika.	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	23
A. Renstra	23
B. Perjanjian Kinerja AKUNTABILITAS KINERJA	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	40
B. Realisasi	68
BAB IV. PENUTUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan	13
Tabel 1.2.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang.....	15
Tabel 1.3.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	17
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja.....	31
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Perubahan.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kota Singkawang	4
--	---

DAFTAR DIAGRAM

	Hal
Diagram III. 1. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat melalui Peningkatan Akuntabilitas Kelembagaannya yang Didukung Kualitas SDM yang Profesional dan Menguasai Perkembangan Teknologi	46
Diagram III. 2. Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Penunjang Kominfo untuk Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Masyarakat	47
Diagram III. 3. Meningkatkan Kualitas SDM di Semua Tingkatan dan Semua Bidang sebagai Ujung Tombak	48
Diagram III. 4. Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Memperoleh Publikasi, Informasi dan Komunikasi	49
Diagram III. 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.....	50
Diagram III. 6. Meningkatkan Pelayanan Administrasi yang Berkualitas.....	51
Diagram III. 7. Realisasi Belanja	71
Diagram III. 8. Realisasi Anggaran.....	73

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Semangat reformasi telah mewarnai pendaya-gunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alinment*, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggung-jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

LKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2017 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggung-jawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, yang membawahi :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- b. Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi.
- c. Seksi Peliputan dan Publikasi.

4. Bidang *E-Government* dan Telematika membawahi :

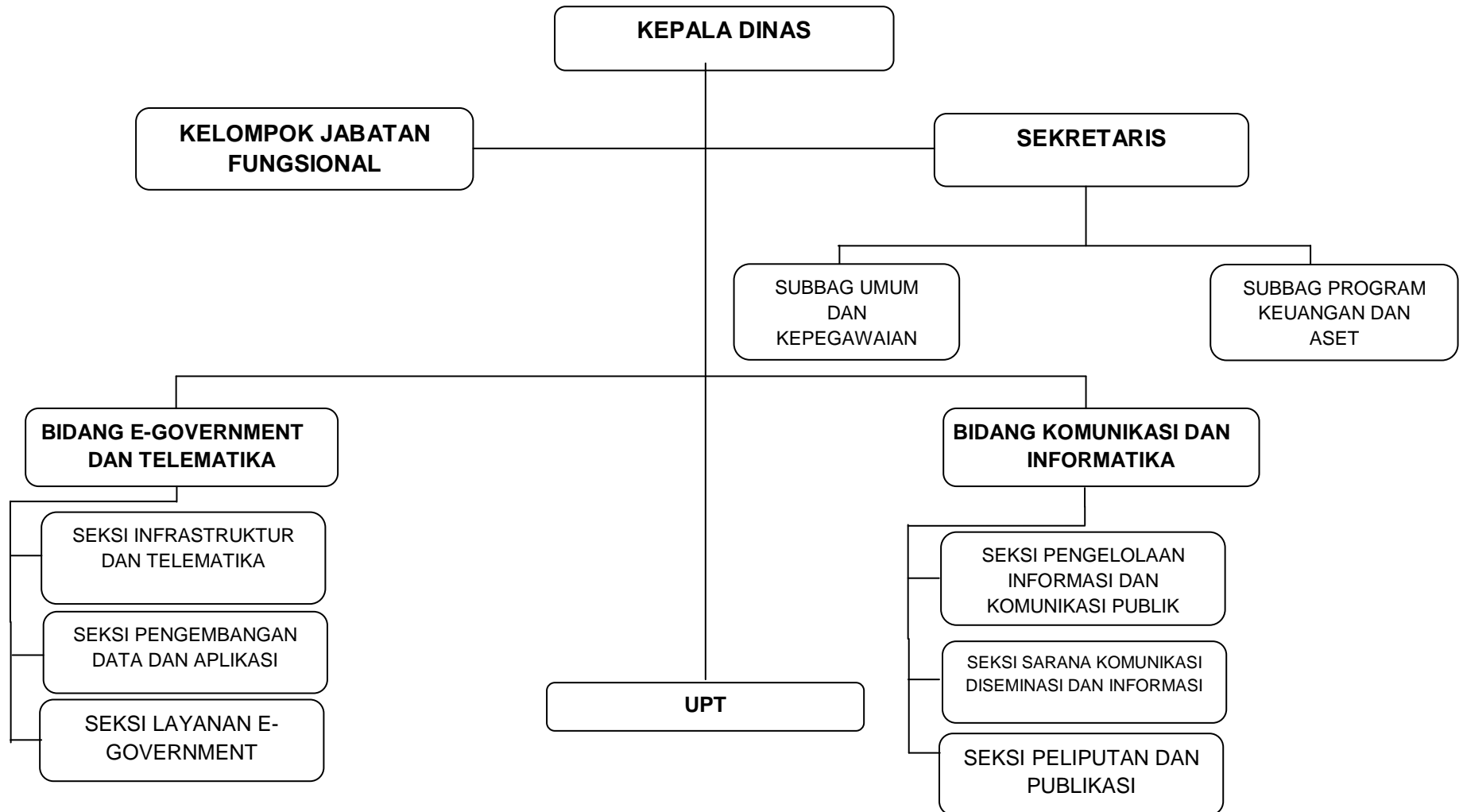
- a. Seksi Infrastruktur dan Telematika.
- b. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi.
- c. Seksi Layanan *E-Government*.

5. Unit UPT

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang memiliki Struktur Organisasi dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kota Singkawang



2.1. Sekretariat

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administratif.

b. Fungsi

- Pengoordinasikan penyusunan program-program bidang secara terpadu.
- Pengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- Pengoordinasikan pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan dinas.
- Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi Umum dan Kepegawaian, Pengelolaan Aset, Penyusunan Program dan Pengelolaan Keuangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi : menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-

undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) **Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis (perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan laporan kinerja dinas (LKT, LKPJ dan LPPD) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

2.2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Tugas

Menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sarana komunikasi diseminasi dan informasi, peliputan dan publikasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana komunikasi diseminasi dan informasi.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis peliputan, publikasi dan persandian.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi dan Seksi Peliputan dan Publikasi, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut ;

1) **Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan petunjuk teknis pengelolaan informasi dan komunikasi

publik, melaksanakan pelayanan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijaksanaan nasional dan pemerintah daerah, dan memberikan pelayanan dan penyediaan akses informasi publik.

2) **Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi**, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis sarana komunikasi diseminasi dan informasi, melaksanakan pembinaan kelompok informasi, media tradisional dan forum komunikasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

3) **Seksi Peliputan dan Publikasi**, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis peliputan dan publikasi, melaksanakan pelayanan kerjasama dengan media massa, peliputan dan penyiaran kegiatan pemerintahan dan non pemerintahan dan pengelolaan media center.

2.3. Bidang *E-Government* dan Telematika

a. Tugas

Menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang *e-government* dan telematika yang meliputi

infrastruktur dan telematika, pengembangan, pengelolaan aplikasi dan data center dan layanan *e-government*.

b. Fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang *e-government* dan telematika.
- Penyiapan bahan perumusan, teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis, infrastruktur dan telematika.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan, pengelolaan aplikasi dan data center.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis layanan *e-government*.
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang *E-Government* dan Telematika.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang *E-Government* dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : Seksi Infrastruktur dan Telematika, Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi, Seksi Layanan *E-Government*, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Seksi Infrastruktur dan Telematika, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, pengolahan data, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis infrastruktur dan telematika, melaksanakan layanan infrastruktur dasar data center,

disaster recovery center dan TIK pemerintah, dan layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Singkawang dan layanan keamanan informasi.

2) **Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi**, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, pengolahan data, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan data dan aplikasi, melaksanakan pelayanan manajemen data dan informasi *e-government* dan statistik sektoral lingkup daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, pelaksanaan integrasi layanan publikasi dan pemerintahan, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* dan layanan *call center* 112 serta pengelolaan data center.

3) **Seksi Layanan E-Government**, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengelolaan layanan *e-government*, melaksanakan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Singkawang, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat, penyediaan layanan nama *domain* dan sub *domain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota, layanan keamanan informasi *e-government*, Sistem

Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi daerah kepada portal pengadaan nasional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sedangkan susunan dan tata kerja berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, ketersediaan sumber daya aparatur / personil yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor penting yang harus dipenuhi. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh personil dinas yang tersedia. Dalam kaitan ini, permasalahan yang dihadapi dinas adalah terbatasnya jumlah personil yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kekurangan jumlah personil sangat dirasakan ketika dihadapkan pada suatu tugas yang menjadi lingkup bidang tertentu, terpaksa dilaksanakan dengan / harus mendaya-gunakan sebagian / seluruh personil bidang lain yang pada skala tertentu dapat berakibat tertundanya tugas pokok personil yang bersangkutan.

Dari segi kualitas, dirasakan disiplin, kompetensi dan kemampuan personil masih belum sepenuhnya memadai. Pelaksanaan tugas dan permasalahan lapangan penyelesaiannya terkesan lambat, tidak tuntas dan sering berdampak pada beban bagi atasan. Pada sisi lain upaya untuk meningkatkan kemampuan personil melalui program diklat teknis dan diklat fungsional belum mendapat perhatian dan penghargaan yang semestinya karena kurangnya dukungan anggaran yang disediakan.

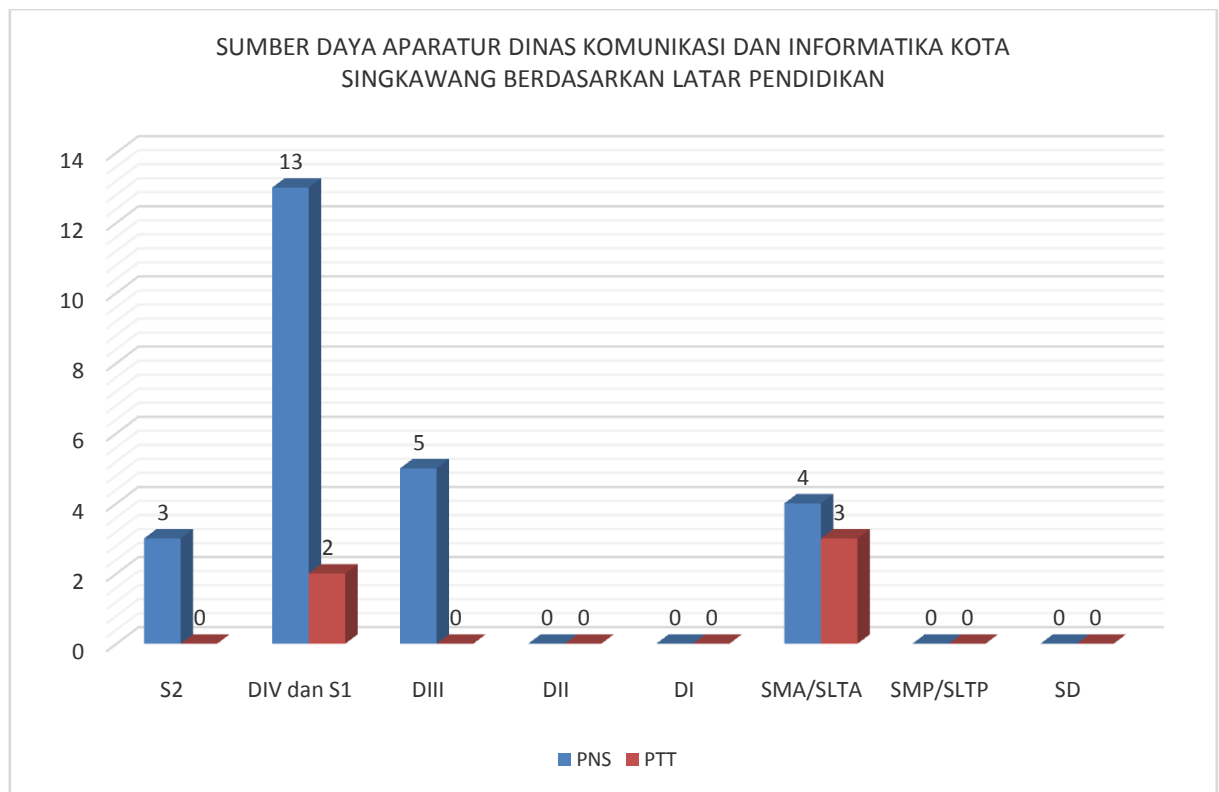
Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun 2017 berjumlah 30 orang yang terdiri dari 25 orang PNS dan 5 orang Honorer/PTT yang tersebar pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Dari jumlah

tersebut dapat diklasifikasikan menurut latar pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

**TABEL 1.1. SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN LATAR PENDIDIKAN**

NO.	LATAR PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	
		PNS	HONORER/PTT
1.	S2	3	-
2.	DIV dan S1	13	2
3.	DIII	5	-
4.	DII	-	-
5.	DI	-	-
6.	SMA/SLTA	4	3
7.	SMP/SLTP	-	-
8.	SD	-	-
JUMLAH		25	5

Sumber : DUK DISKOMINFO 2017



Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi *eksisting* menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat DIV dan S1.

**TABEL 1.2. SUMBER DAYA APARATUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN GOLONGAN RUANG**

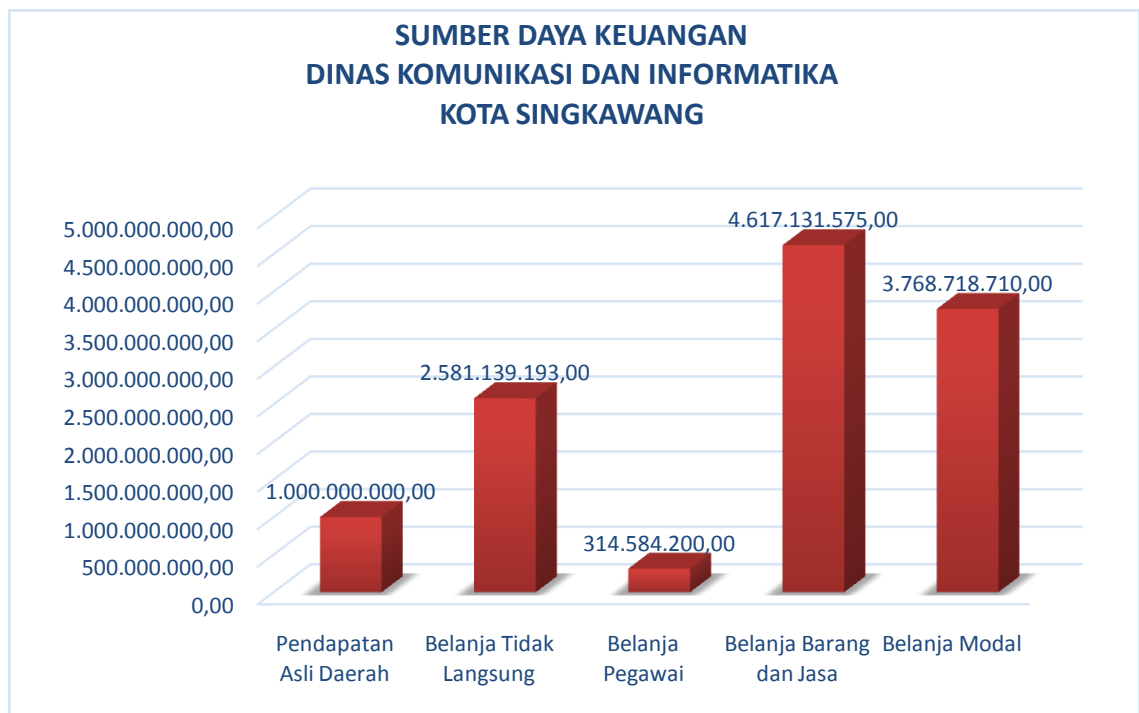
NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	IVc	1
2.	IVb	-
3.	IVa	2
4.	IIIId	7
5.	IIIc	3
6.	IIId	6
7.	IIa	-
8.	IId	4
9.	Ic	1
10.	Ib	1
11.	Ia	-
12.	Id	-
13.	Ic	-
JUMLAH		25

Sumber : DUK DISKOMINFO 2017

**TABEL 1.3. SUMBER DAYA KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan	1.000.000.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.000.000.000,00
2.	Belanja	11.281.573.678,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.581.139.193,00
2.2	Belanja Langsung	8.700.434.485,00
	Belanja Pegawai	314.584.200,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.617.131.575,00
	Belanja Modal	3.768.718.710,00

Sumber : DPA DISKOMINFO 2017



6. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sebagaimana yang diharapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selain atas usaha para personil dan dukungan dari semua pihak juga tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Data sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang terlampir.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai “*entry point*” atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut :

1. Kapasitas Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Singkawang

Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakkan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah Kota Singkawang, keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakin membaiknya kinerja pemerintahan di Kota

Singkawang. Demikian halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Singkawang, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sejauh ini.

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan sumber daya, baik berupa dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Seiring dengan kondisi tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, memiliki tanggung-jawab yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan di bidang tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kemampuan manajerial dalam merencanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, serta dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

2. Pemerataan Layanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika yang merupakan kegiatan pelayanan lalu lintas berita, uang dan barang serta merupakan jaringan yang penting dan mempunyai jangkauan terhadap perkembangan kehidupan manusia dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah

meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di samping mempunyai fungsi sosial, menghilangkan isolasi daerah terpencil, komunikasi dan informatika juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan menyalurkan potensi kegiatan ekonomi dari dan kepada seluruh lapisan serta anggota masyarakat. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ruang udara dan angkasa yang di dalamnya terdapat spektrum frekuensi radio, orbit *geostasioner*, dan orbit lainnya yang merupakan sumber daya alam yang makin terbatas. Penggunaan gelombang radio dan pemanfaatan orbit satelit sangat berkaitan dengan nilai ekonomi, keselamatan jiwa manusia, serta keamanan negara. Demikian pentingnya manfaat bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat banyak, maka perlu ditempuh berbagai kebijaksanaan, yang pokok-pokoknya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan, meningkatkan pemerataan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan peran serta swasta, meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan penguasaan dan penerapan iptek dalam penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan industri telekomunikasi, meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Peran Serta Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan infrastruktur yang memadai memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan membutuhkan

dana yang sangat besar. Kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan dana bagi pengembangan infrastruktur secara maksimal. Oleh karena itu partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur menjadi komponen yang penting untuk keberlanjutan pembangunan. Partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur dapat berbentuk privatisasi atau kerjasama (*partnerships*). Privatisasi berarti ada pemindahan kepemilikan (*divestiture*) dari pemerintah kepada swasta. Di sini peran pemerintah cenderung sebagai regulator dan sudah tidak lagi menangani pelayanan infrastruktur secara langsung sebagai ketersediaan infrastruktur yang memadai memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan membutuhkan dana yang sangat besar. Kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan dana bagi pengembangan infrastruktur secara maksimal. Oleh karena itu partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur menjadi komponen yang penting untuk keberlanjutan pembangunan. Partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur dapat berbentuk privatisasi atau kerjasama (*partnerships*). Privatisasi berarti ada pemindahan kepemilikan (*divestiture*) dari pemerintah kepada swasta. Di sini peran pemerintah cenderung sebagai regulator dan sudah tidak lagi menangani pelayanan infrastruktur secara langsung sebagai penyelenggara. Resiko bisnis sepenuhnya ada ditangan swasta. Berbeda dengan privatisasi, kerjasama lebih mengarah pada pengelolaan oleh swasta pada aset milik pemerintah. Selain sebagai regulator, pemerintah juga menetapkan standar pelayanan minimum yang harus disediakan swasta dalam menyelenggarakan infrastruktur tersebut.

Kerjasama yang terbentuk dapat berupa *Build-Operate-Transfer (BOT)*, *lease* atau *konsesi*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 karena secara nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut merupakan visi kepala daerah terpilih periode 2013-2017:

“Singkawang aman, nyaman, maju dan sejahtera berbasis jasa, perdagangan dan agro industri”

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah Kota Singkawang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya *“Kota Singkawang sebagai Kota Pariwisata, Perdagangan, Jasa dan Agro Industri”*. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Singkawang pada periode 2013-2017. Rakyat Singkawang Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat Kota Singkawang.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dituntut untuk mampu mewujudkan Visi Pembangunan Kota Singkawang 2013-2017, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang pada periode 2017 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Kota Singkawang sebagai Kota Jasa, Perdagangan, dan Pariwisata tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang menetapkan Visi 2013-2017 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:

“MEWUJUDKAN KINERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL BERDAYA SAING DAN BERNILAI TAMBAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH”

2. Misi

Berikut merupakan Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2013-2017 untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah Terpilih:

- a. Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi dasar masyarakat (fasilitasi pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih).
- c. Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Melaksanakan pendistribusian pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan.
- e. Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat kota.
- f. Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur.
- g. Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang.
- h. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan olahraga serta pengelolaan panti anak yatim piatu dan lansia.
- i. Reformasi birokrasi dan tata laksana pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 2013-2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 2013-2017, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Kota Singkawang 2013-2017 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

Untuk itu, dalam mengapresiasi upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kota Singkawang 2013-2017, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang menetapkan Misi 2017 sebagai berikut :

- Memperluas jaringan pelayanan komunikasi dan informatika yang mampu menjangkau seluruh wilayah terutama daerah-daerah sentra produksi, wisata dan peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
- Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas aparatur.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Memperluas jaringan pelayanan komunikasi dan informatika yang mampu menjangkau seluruh wilayah terutama daerah-daerah sentra produksi, wisata dan peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan SDM di bidang Kominfo;
- b) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi;
- c) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;

- d) Pengadaan sistem pengendalian menara telekomunikasi;
- e) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
- f) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Utama

a) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Sasaran Renstra meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang Kominfo, untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat. Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :

- a) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, pendistribusian / penyebaran jaringan internet ke masyarakat, terlaksananya pelatihan IT bagi masyarakat);
- b) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (tersedianya 100 buku hasil penelitian / survey perkembangan teknologi di Kota Singkawang);
- c) Pengkajian dan pengembangan kebijakan sistem informasi (tersedianya *master plan e-gov*, tersedianya *re-design master plan tower* telekomunikasi bersama, tersedianya sistem aplikasi SKPD dalam satu *Network Operating Center (NOC)* guna peningkatan pelayanan publik);
- d) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informatika);
- e) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (meningkatnya PAD dan nilai investasi di bidang kominfo / telekomunikasi, tersedianya sistem aplikasi SKPD dalam satu *Network Operating Center (NOC)* guna peningkatan pelayanan publik, tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informatika);

- f) Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan Bidang Kominfo (tersedianya *draft* peraturan Bidang Kominfo);
 - g) Pengadaan alat studio dan komunikasi (tersedianya alat studio dan komunikasi).
- b. Sasaran Renstra pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam memperoleh publikasi, informasi dan komunikasi. Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :
- a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (tersedianya media komunikasi berupa majalah, buku, banner, baliho, brosur dll);
 - b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (terlaksananya *talk show*, MOU, dialog interaktif, sosialisasi dan konferensi pers);
 - c) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (terlaksananya 100 kali diseminasi dan penyuluhan bagi masyarakat, tersedianya 50.000 set brosur penyuluhan).
- c. Sasaran Renstra memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam memperoleh komunikasi dan informasi. Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :
- a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (tersedianya hasil pengkajian dan penelitian bidang kominfo dalam bentuk 100 buah buku).
- d. Sasaran Renstra meningkatkan kualitas SDM di semua tingkatan dan semua bidang sebagai ujung tombak. Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :
- a) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (meningkatnya kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan informatika, terealisasinya keikutsertaan aparatur bidang kominfo dalam Rapat Koordinasi BAKOHUMAS).

- b) Bidang E-Government dan Telematika
- a. Sasaran Renstra meningkatkan kualitas dan kuantitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut:
 - a) Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengumuman dan pengadaan melalui *e-procurement* (persentase SKPD yang mengimplementasikan pelelangan tuntas pengadaan barang / jasa melalui *procurement*).
 - b. Sasaran Renstra meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang kominfo untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (persentase peningkatan *respon time* pelayanan masyarakat).
 - c. Sasaran Renstra meningkatkan pelayanan administrasi yang berkualitas. Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :
 - a) Jumlah SKPD yang terpasang CCTV (persentase peningkatan dan pengendalian pengawasan gedung kantor dan sarana publik);
 - b) Jumlah jaringan telekomunikasi FO (persentase peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jaringan telekomunikasi)
 - c) Pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi (meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dimana layanan pemerintah bersifat transparan, akuntabel dan bebas korupsi);
 - d) Pembangunan *control room* Pemerintah Kota Singkawang (persentase peningkatan sarana dan prasarana TIK);
 - e) Jumlah aplikasi yang *dicustomizing* / rekayasa (peningkatan kualitas pelayanan SKPD, transparansi pemerintahan serta efisiensi waktu dan biaya pelayanan);
 - f) Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam Aplikasi SIMAYA (meningkatnya efisiensi dan efektifitas waktu dan biaya penyelenggaraan administrasi perkantoran pada SKPD se Kota Singkawang).

B. PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran. Dan ini diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib untuk menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja setiap satuan kerja menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjian juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud keseimbangan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yakni :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Optimalisasi Pelaksanaan Kinerja Administrasi dan Operasi	Persentase Penyelesaian Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%	Program Pelayanan Administrasi	2.418.629.950,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kendaraan untuk Dinas dan Operasional	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	236.490.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Usia Pakai Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.000.000,00
Peningkatan Pengembang	Laporan Kinerja Kominfo	100 %	Program Peningkatan	8.000.000,00

an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan Keuangan TA 2017			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
Penguatan Tranparansi Publik	Persentase Peningkatan Usia Pakai Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		Program Penguatan Transparansi Publik	20.000.000,00
Pengembang an Komunikasi dan Informasi dan Media Massa	Tersedianya Konten Informasi dan Pelayanan Informasi Publik	80 %		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	5.829.112.700,00
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo	Terbentuknya dan Meningkatnya Peranan Pelajar dan SDM Aparatur dalam Desiminasi Informasi	80%		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	348.058.625,00
Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi Masyarakat	80 %		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo	339.957.900,00
Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov	Persentase SKPD yang Mengimplementasik an Pelelangan Tuntas Pengadaan Barang/Jasa melalui e-	90%		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/LPSE	58.472.475,00

	<i>Procurement</i>				
	Persentase Peningkatan dan Pengendalian Pengawasan Gedung Kantor dan Sarana Publik	305		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/Pembangunan Jaringan CCTV	442.747.235,00
	Persentase Peningkatan Konektifitas dan Aksesibilitas Jaringan Telekomunikasi	5%		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	1.728.365.425,00
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dimana Layanan Pemerintah Bersifat Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi	30%		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	721.242.925,00
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK	30%		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/Pembangunan <i>Controll Room</i>	2.249.776.325,00

	Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan	30%		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/Pengembangan Aplikasi GMRS	50.893.925,00
		30%		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/Sistem Informasi Agenda Walikota	45.893.925,00
		30%		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/Pengembangan Sistem Aplikasi	1.480.412.925,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan	30%		Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov/Sistem Informasi e-PDAM	55.893.925,00
	Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan TIK Pemerintah Kota Singkawang	50%		Program Optimalisasi Penyusunan Masterplan TIK	116.494.225,00

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2

TABEL 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat melalui Peningkatan Akuntabilitas Kelembagaan yang Didukung Kualitas SDM yang Profesional dan Menguasai Perkembangan Teknologi	Persentase Penyelesaian Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	Program Pelayanan Administrasi	3.185.947.450,00
	Tersedianya Kendaraan untuk Dinas dan Operasional.	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	564.370.000,00
	Persentase Peningkatan Usia Pakai Sarana dan Prasarana Aparatur.	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	564.370.000,00
	Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	100 %	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.000.000,00
	Persentase Peningkatan Transparansi Informasi Kinerja	100 %	Program Penguatan Transparansi	20.000.000,00

	SKPD			Publik	
Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Penunjang Kominfo untuk Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Masyarakat	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (Tersedianya Konten Informasi dan Pelayanan Informasi Publik)	80 %		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	544.952.700,00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Persentase Peningkatan <i>Respon Time</i> Pelayanan Masyarakat)	30%		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	256.758.900
Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Penunjang Kominfo untuk Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Masyarakat	Terbentuknya dan Meningkatnya Peranan Pelajar dan SDM Aparatur dalam Diseminasi Informasi	80 %		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kominfo (Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi dan Komunikasi)	137.449.800,00
Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi Masyarakat	80 %		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	339.957.900,00

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Pengumuman dan Pengadaan Melalui e- <i>Procurement</i> (Persentase SKPD yang Mengimplementasikan Pelelangan Tuntas Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Procurement</i>)	90 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov / LPSE	173.463.700,00
Meningkatkan Pelayanan Administrasi yang Berkualitas	Jumlah SKPD yang Terpasang CCTV (Persentase Peningkatan dan Pengendalian Pengawasan Gedung Kantor dan Sarana Publik)	30 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov /Pembangunan Jaringan CCTV	442.747.235,00
	Jumlah Jaringan Telekomunikasi FO (Persentase Peningkatan Konektifitas dan Aksesibilitas Jaringan Telekomunikasi)	5 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov /Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	1.508.365.425,00

	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi (Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Dimana Layanan Pemerintah Bersifat Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi)	30 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov /Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	721.242.925,00
	Pembangunan <i>Control Room</i> (Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK)	30 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov /Pembangunan <i>Control Room</i> Pemerintah Kota Singkawang	509.851.325,00
	Jumlah Aplikasi yang <i>Dicustomizing/Rekayasa</i> (Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan)	30 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov /Pengembangan Aplikasi GMRS	118.393.925,00

	Jumlah Aplikasi yang <i>Dicustomizing/Rekayasa</i> (Peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan)	30 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov /Sistem Informasi Agenda Walikota	40.593.925,00
	Jumlah Aplikasi yang <i>Dicustomizing/Rekayasa</i> (Peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan)	50 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov /Sistem Informasi e-PDAM	26.520.000,00
	Jumlah Aplikasi yang <i>Dicustomizing/Rekayasa</i> (Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan)	30%	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov /Pengembangan sistem Aplikasi	324.286.850,00
	Jumlah SKPD yang Difasilitasi dalam Aplikasi SIMAYA (Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Waktu dan Biaya Penyelenggaraan Administrasi	80%	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kominfo (Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi perkantoran	17.991.325,00

	Perkantoran pada SKPD se Kota Singkawang)			SIMAYA)		
--	---	--	--	----------	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan implementasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku pelaksana sebagian kebijakan dari Pemerintah Daerah, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) , Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Aktualisasi dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun 2017 disajikan dalam bentuk analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (SKPD);
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran 4 (empat) kategori :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 75 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil**. Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata – Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing – masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata – rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

Dimana n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***

Sasaran – sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang:

➤ **Sasaran 1**

“Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan akuntabilitas kelembagaan yang didukung kualitas SDM yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi”.

Sasaran ini diarahkan melalui upaya peningkatan penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah, peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program yaitu :

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Program peningkatan disiplin aparatur;
- d) Program penguatan transparansi publik.

➤ Sasaran 2

“Memperluas jaringan pelayanan komunikasi dan informatika yang mampu menjangkau seluruh wilayah terutama daerah-daerah sentra produksi dan wisata”

Sasaran diarahkan melalui peningkatan pelayanan jasa komunikasi dan informatika, pengembangan komunikasi, informasi dan media massa serta kerja sama informasi dan media massa.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu :

- a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- c) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

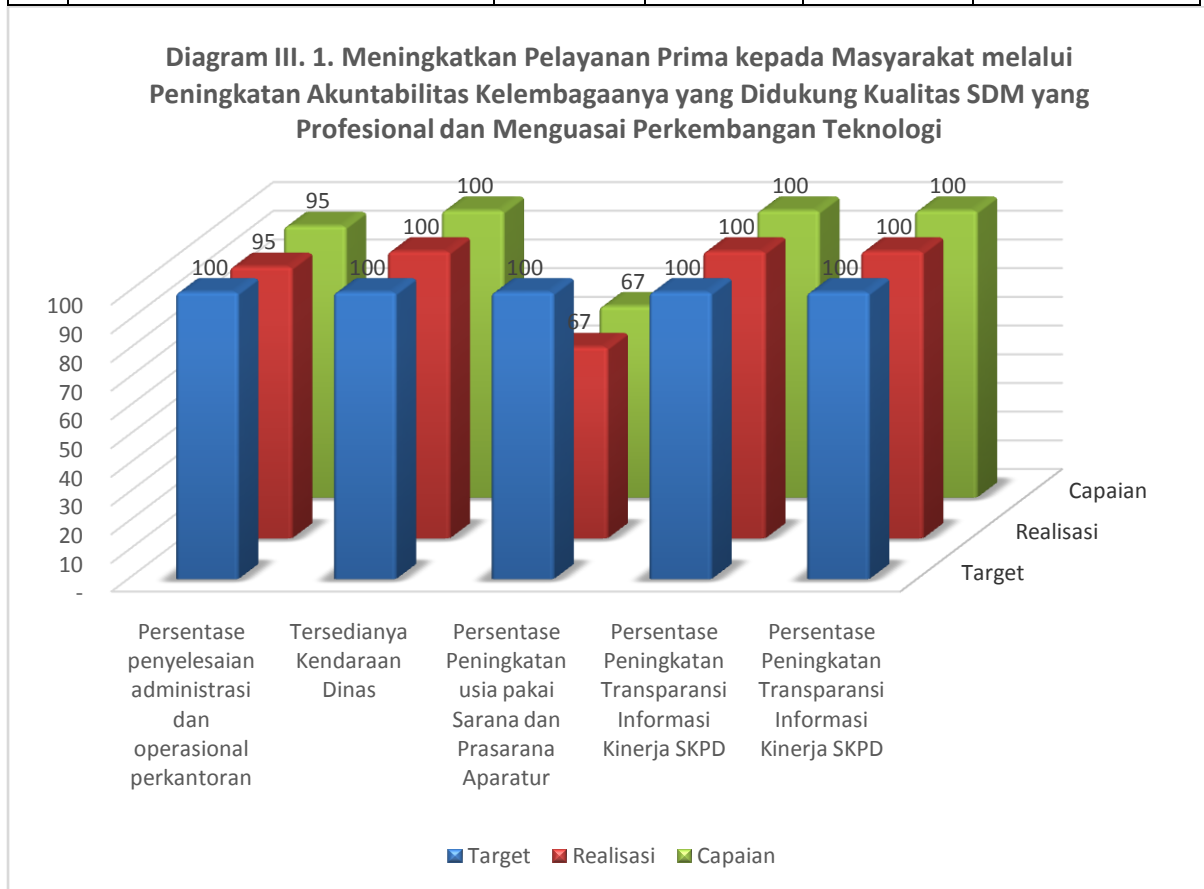
Adapun data – data dan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

- a) Sasaran Strategis: meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan akuntabilitas kelembagaanya yang didukung kualitas SDM yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi.

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Persentase penyelesaian administrasi dan operasional perkantoran	%	100	94,62	94,62
	Tersedianya Kendaraan Dinas	%	100	100	100
	Persentase Peningkatan usia pakai Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	66,67	66,67
	Persentase Peningkatan Transparansi Informasi	%	100	100	100

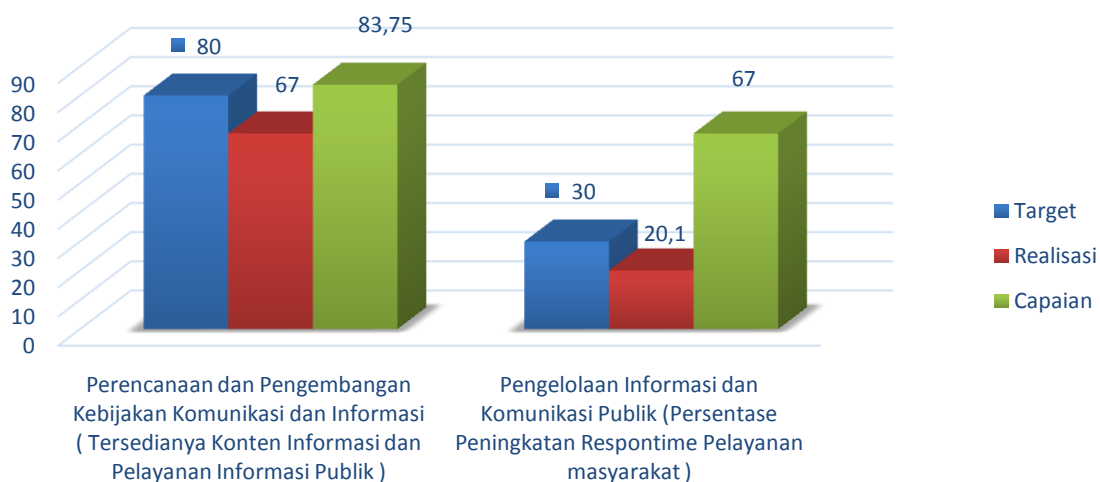
Kinerja SKPD				
--------------	--	--	--	--



- b) Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang Kominfo untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (Tersedianya Konten Informasi dan Pelayanan Informasi Publik)	%	80	67,00	83,75
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Persentase Peningkatan <i>Respon</i> time Pelayanan Masyarakat)	%	30	20,10	67,00

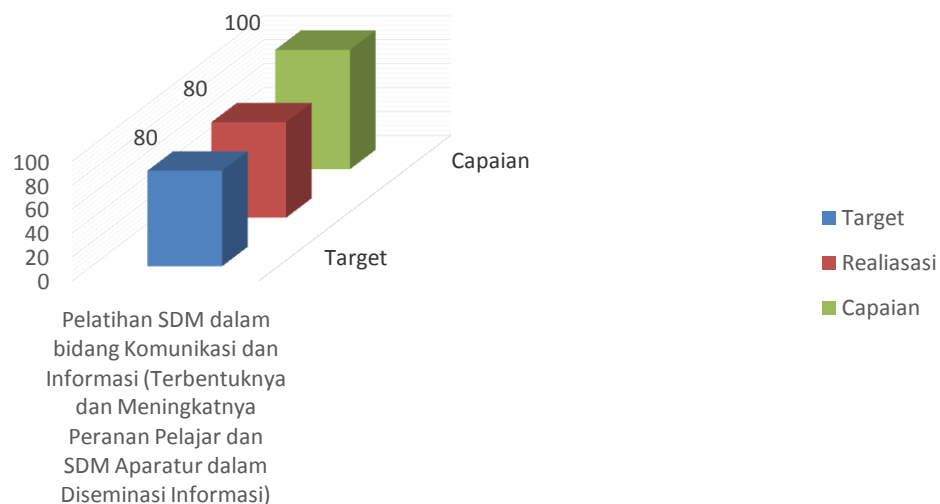
Diagram III. 2. Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Penunjang Kominfo untuk Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan masyarakat



- c) Meningkatkan kualitas SDM di semua tingkatan dan semua bidang sebagai ujung tombak

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (Terbentuknya dan Meningkatnya Peranan Pelajar dan SDM Aparatur dalam Diseminasi Informasi)	%	80	80,00	100,00

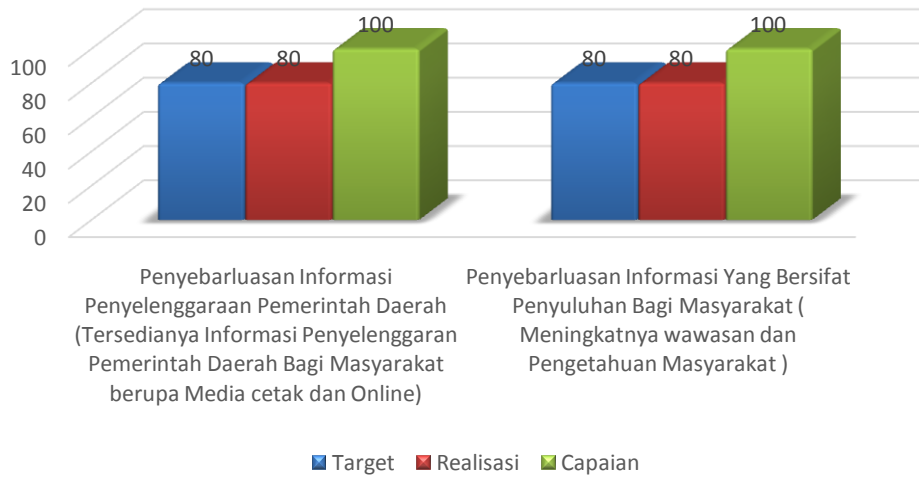
Diagram III. 3. Meningkatkan Kualitas SDM di Semua Tingkatan dan Semua Bidang sebagai Ujung Tombak



- d) Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam memperoleh publikasi, informasi dan komunikasi

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagi Masyarakat berupa Media Cetak dan Online)	%	80	80,00	100,00
	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Masyarakat)	%	80	80,00	100,00

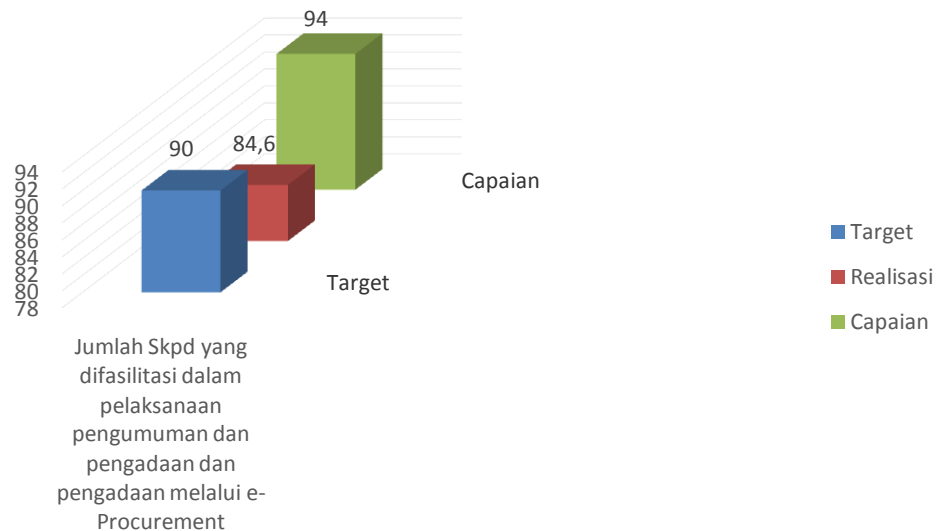
Diagram III. 4. Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Memperoleh Publikasi, Informasi dan Komunikasi



e) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengumuman dan pengadaan melalui <i>e-Procurement</i> (Persentase SKPD yang mengimplementasikan Pelelangan tuntas Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Procurement</i>)		%	90	84,60	94,00

Diagram III. 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah



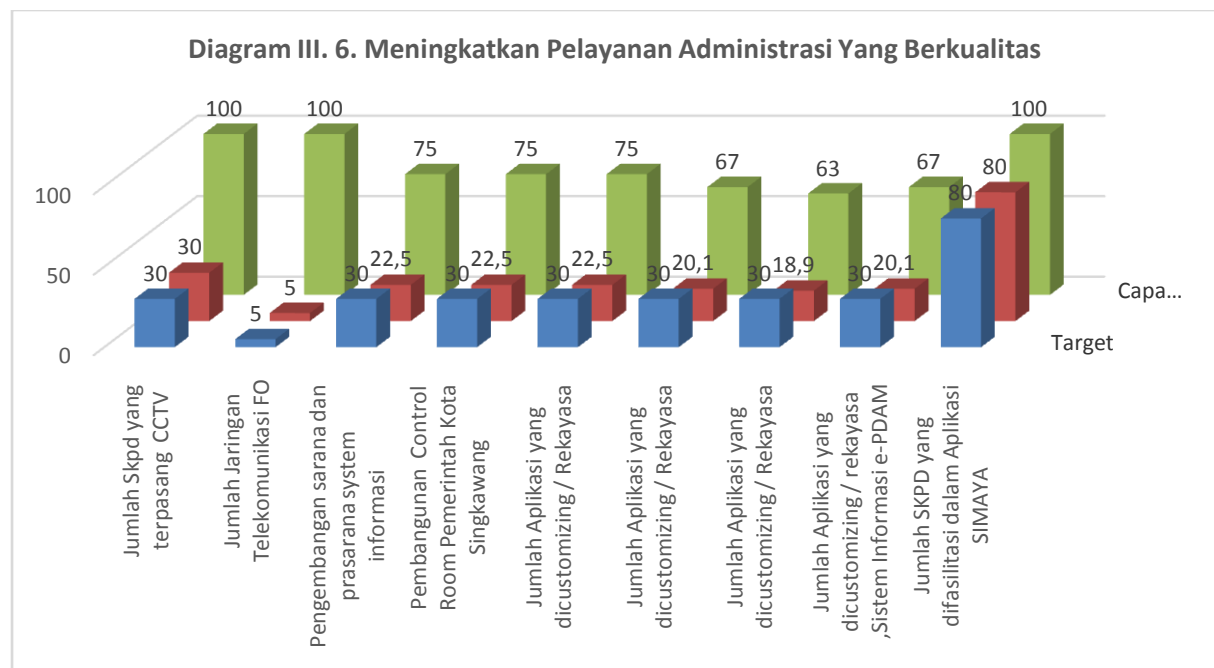
f) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Yang Berkualitas

Indikator Kinerja		Program / Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Jumlah SKPD yang terpasang CCTV (Persentase Peningkatan dan Pengendalian Pengawasan Gedung Kantor dan Sarana Prasarana Publik)	Jumlah SKPD yang terpasang CCTV	Pembangunan Jaringan CCTV	%	30	30,00	100,00
	Jumlah Jaringan Telekomunikasi FO (Persentase Peningkatan Konektifitas dan Akseibilitas)	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	%	5%	5,00	100,00

	Jaringan Telekomunikasi)					
	Pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi (Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Dimana Layanan Pemerintah Bersifat Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi)	Pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi	%	30	22,50	75,00
	Pembangunan Control Room Pemerintah Kota Singkawang (Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK)	Pembangunan Control Room Pemerintah Kota Singkawang	%	30	22,50	75,00
	Jumlah Aplikasi yang <i>dicustomizing</i> / Rekayasa (Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD, Transparansi Pemerintahan	Pengembangan Aplikasi GMRS (<i>Goverment Management Resources System</i>)	%	30	22,50	75,00

	serta Efisiensi waktu dan biaya pelayanan)					
		Pengembangan Sistem Informasi Agenda Walikota	%	30	20,10	67,00
		Pengembangan Sistem Aplikasi	%	30	18,90	63,00
	Jumlah Aplikasi yang <i>dicustomizing</i> / rekayasa ,Sistem Informasi e-PDAM (Peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi waktu dan biaya pelayanan)	Sistem Informasi e-PDAM	%	30	20,10	67,00
	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam Aplikasi SIMAYA (Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas waktu dan biaya	Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Perkantoran (SIMAYA)	%	80	80,00	100,00

penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada SKPD se Kota Singkawang)					
--	--	--	--	--	--



Dari data perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yaitu 89,38 % termasuk dalam rentang capaian “BAIK”. Hal tersebut dalam konversi skala pengukuran ordinal dapat dinyatakan berhasil. Hasil capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras aparaturnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas – tugasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas, Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Uraian Sumber Daya	Yang dibutuhkan	Yang tersedia
1.	Sekretariat		
-	Pengadministrasian Umum	1	1

-	Pengelola Kearsipan	1	0
-	Pengadministrasian Kepegawaian	1	0
-	Analisis Jabatan / BK	2	0
-	Pengemudi / Driver	1	0
-	Pramu Kebersihan	1	0
-	Bendahara Pengeluaran	1	1
-	Pengelola Data Pelaks. Program dan Anggaran	1	0
-	Pengadministrasi Keuangan	2	1
-	Bendahara Penerimaan	1	0
-	Pengadministrasi Barang	2	0
-	Pengelola Evaluasi dan Pelaporan	1	0
2.	Bidang E-Government dan Telematika		
-	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1	1
-	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	1	0
-	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	0
-	Teknisi Jaringan Instalasi	1	0
-	Analisis Data dan Informasi	1	0
-	Pengolah Data	1	0
-	Operator Komunikasi	1	0
-	Pengelola Database	1	0
-	Analisis Sumber Daya Iptek	1	1
-	Pengolah Situs / Web	1	0
-	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	1	0
-	Analisis Informasi	1	1
3.	Bidang Komunikasi, dan Informatika		

-	Analisis Konten Media Sosial	1	1
-	Perancang Grafis	1	0
-	Pengelola Pengaduan Publik	1	0
-	Pengelola TV dan Radio	1	1
-	Juru Informasi dan Komunikasi	3	0
-	Operator Radio	1	0
-	Analisis Publikasi	1	1
-	Analisis Berita	1	1
-	Pengelola MC dan Kemitraan Media	1	1
-	Tenaga peliputan	1	0
-	Operator Sandi dan Telekomunikasi	1	0
-	Operator Transmisi Sandi	1	0
4.	Jabatan Fungsional Tertentu		
	Pranata Humas	1	0
	Operator Komputer	1	0
	Arsiparis	1	0
	Pustakawan	1	0

Sumber : Data Analisis Jabatan Diskominfo Tahun 2017

- b. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tidak terlepas dari kerja keras aparatur dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas – tugasnya.

Keberhasilan tersebut tentunya tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari Pemerintah Kota Singkawang. Dukungan yang paling nyata tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Beberapa program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan;
 - Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- Program Penguatan Transparansi Publik :

- Expo Kinerja SKPD.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

NO.	TAHUN	REALISASI	CAPAIAN	KET
1.	2013	93,35%	BAIK	DISHUBKOMINFO
2.	2014	93,93%	BAIK	DISHUBKOMINFO
3.	2015	85,95%	BAIK	DISHUBKOMINFO
4.	2016	90,86%	BAIK	DISHUBKOMINFO
5.	2017	89,38%	BAIK	DISKOMINFO

Realisasi kinerja dan capaian kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tolak ukur dari perjanjian kinerja. Capaian kinerja bisa diketahui dari rentangan capaian kinerja. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berangsur-angsur mendapat capaian kinerja “BAIK”.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah perencanaan strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI				TARGET 2017
			2014	2015	2016	2017	
			DISHUBKOMINFO			DISKOM INFO	
1.	Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang hubkominfo, untuk memberikan kemudahan pelayananan masyarakat	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, pendistribusian/ penyebaran jaringan internet ke masyarakat, terlaksananya pelatihan IT bagi masyarakat)	100	98,62	100		100
		- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tersedianya 100 buku hasil penelitian / survey perkembangan teknologi di Kota Singkawang)	-	-	-		100
		- Pengkajian dan pengembangan kebijakan sistem informasi (Tersedianya master plan <i>E-Gov</i> , tersedianya <i>Re-Design Master Plan Tower Telekomunikasi Bersama</i> ,	-	-	-		100

		tersedianya sistem aplikasi SKPD dalam satu <i>Network Operating Center (NOC)</i> guna peningkatan pelayanan publik)					
		- Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (Tersedianya Konten Informasi dan Pelayanan Informasi Publik)				83,75	
		- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Persentase Peningkatan <i>Resptime</i> Pelayanan masyarakat)				67,00	
2.	Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang hubkominfo, untuk memberikan kemudahan pelayananan masyarakat	- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (Tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informatika)	100	100	100	100	100
		- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (Meningkatnya PAD dan nilai investasi di Bidang Kominfo /	-	97,31	-		100

		Telekomunikasi, tersedianya sistem aplikasi SKPD dalam satu <i>Network Operating Center (NOC)</i> guna peningkatan pelayanan publik, tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informatika)					
		- Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan Bidang Kominfo (Tersedianya draft peraturan Bidang Kominfo)	-	-	-		100
		- Pengadaan alat studio dan komunikasi (Tersedianya alat studio dan komunikasi)	-	-	98,74		100
3.	Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam memperoleh publikasi, informasi dan komunikasi	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (Tersedianya media komunikasi berupa majalah, buku, banner, baliho, brosur dll)	100	100	98,11	100	100
		- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Terlaksananya talk show, MOU, dialog interaktif, sosialisasi	99,13	100	99,95		100

		dan konferensi pers)					
		- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (Terlaksananya 100 kali diseminasi dan penyuluhan bagi masyarakat, tersedianya 50.000 set brosur penyuluhan)	100	100	100	100	100
4.	Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam memperoleh komunikasi dan informasi	- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (Tersedianya hasil pengkajian dan penelitian bidang kominfo dalam bentuk 100 buah buku)	-	-	-	-	

5.	Meningkatkan kualitas SDM di semua tingkatan dan semua bidang sebagai ujung tombak	- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan informatika, terealisasinya keikutsertaan aparatur bidang kominfo dalam Rapat Koordinasi BAKOHUMAS)	-	-	99,29		
		-Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (Terbentuknya dan meningkatnya peranan pelajar dan SDM aparatur dalam diseminasi informasi)				100,00	

6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	- Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengumuman dan pengadaan dan pengadaan melalui <i>e-Procurement</i> (Persentase SKPD yang mengimplementasikan Pelelangan Tuntas Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Procurement</i>)			100	94,00	
7	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Yang Berkualitas	- Jumlah SKPD yang terpasang CCTV (Persentase Peningkatan dan Pengendalian Pengawasan Gedung Kantor dan Sarana Prasarana Publik)			20,00	100,00	
		- Jumlah Jaringan Telekomunikasi FO (Persentase Peningkatan Konektifitas dan Aksesibilitas Jaringan Telekomunikasi)			-	100,00	

		- Pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi (Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Dimana Layanan Pemerintah Bersifat Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi)			30,00	75,00	
		- Pembangunan Control Room Pemerintah Kota Singkawang (Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK)				75,00	
		- Jumlah Aplikasi yang <i>dicustomizing</i> / Rekayasa (Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan)			20,00	75,00	

		- Jumlah Aplikasi yang <i>dicustomizing</i> / Rekayasa (Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi waktu dan biaya pelayanan)			20,00	67,00	
		- Jumlah Aplikasi yang <i>dicustomizing</i> / Rekayasa (Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD, Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi waktu dan biaya pelayanan)			20,00	63,00	
		- Jumlah Aplikasi yang <i>dicustomizing</i> / rekayasa ,Sistem Informasi e-PDAM (Peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM,Transparansi Pemerintahan serta Efisiensi waktu dan biaya pelayanan)			20,00	67,00	
		- Jumlah SKPD yang difasilitasi			-	100	

		dalam Aplikasi SIMAYA (Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas waktu dan biaya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada SKPD se Kota Singkawang)					
--	--	---	--	--	--	--	--

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Keberhasilan

Sesuai dengan hasil laporan realisasi fisik dan keuangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 sebesar 82,25%. Hal tersebut dalam konversi skala pengukuran ordinal dapat dinyatakan berhasil.

Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Keberhasilan ini juga tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari pihak – pihak terkait, baik instansi kedinasan (SKPD) lainnya, instansi vertikal maupun pihak swasta dan masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai diharapkan agar kinerja para aparatur dapat ditingkatkan dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dapat selalu terjaga keharmonisannya.

b) Kegagalan

- Penyebab kegagalan atau penurunan

Pada Program Optimalisasi Sistem Informasi *E-Gov* terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan antara lain :

- 1) Kegiatan Pembangunan Control Room Pemerintah Kota Singkawang.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Pembangunan fisik control room tidak dapat terlaksana karena ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam dokumen perencanaan, sehingga tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan control room karena waktu sudah sudah tidak rasional lagi untuk mengadakan proses lelang.
- Adanya rasionallisasi anggaran.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Dianggarkan kembali pada tahun 2018.

2) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Adanya kebijakan untuk tidak direalisasikan untuk menutup defisit anggaran.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Dianggarkan kembali pada tahun 2018.

3) Kegiatan Pengembangan Aplikasi GMRS

Hambatan dan kendala dalam pencapaian dalam sasaran ini antara lain :

- Aplikasi GMRS sudah terlaksana, hanya untuk kegiatan perjalanan dinas untuk pelatihan dan peningkatan SDM tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Dianggarkan kembali pada tahun 2018.

Pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan antara lain :

1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Pembangunan fisik *control room* tidak dapat terlaksana karena ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam dokumen perencanaan, sehingga tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan control room karena waktu sudah sudah tidak rasional lagi untuk mengadakan proses lelang.
- Adanya rasionallisasi anggaran.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Dianggarkan kembali pada tahun 2018.

B. REALISASI

Akuntabilitas keuangan meliputi Perhitungan Anggaran (PA) Neraca dan Laporan Arus Kas atas pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2017, periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Namun demikian, baik realisasi atas anggaran pendapatan maupun anggaran belanja yang disajikan dalam bagian ini berdasarkan angka realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada akhir tahun 2017.

1. Pendapatan Tahun 2017

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Menara Bersama	1.000.000.000,00	73.080.000,00	7,31
Jumlah		1.000.000.000		

Realisasi pendapatan retribusi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun anggaran 2017, secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu mencapai Rp73.080.000,00 atau sebesar 7,31% dari target pendapatan sebesar Rp.1.000.000.000,00. Hambatan atau kendala tidak tercapainya target antara lain:

- a. Masih lemahnya sistem perencanaan, pengawasan, manajemen dan penerapan sanksi (*low enforcement*) yang dikenakan pada wajib pajak yang bermasalah.
- b. Masih kurangnya fasilitas sarana maupun prasarana dalam mengelola retribusi daerah.
- c. Masih rendahnya kualitas SDM aparat yang menangani dan mengelola retribusi daerah sehingga potensi yang ada belum tergali secara maksimal.

- d. Dimenangkannya gugatan wajib pajak Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Mahkamah Konstitusi sehingga nilai tarif pungutan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang nilai tarif pungutan.
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, proses perubahannya belum selesai.

Solusi yang diambil untuk menyikapi masalah di atas adalah sebagai berikut:

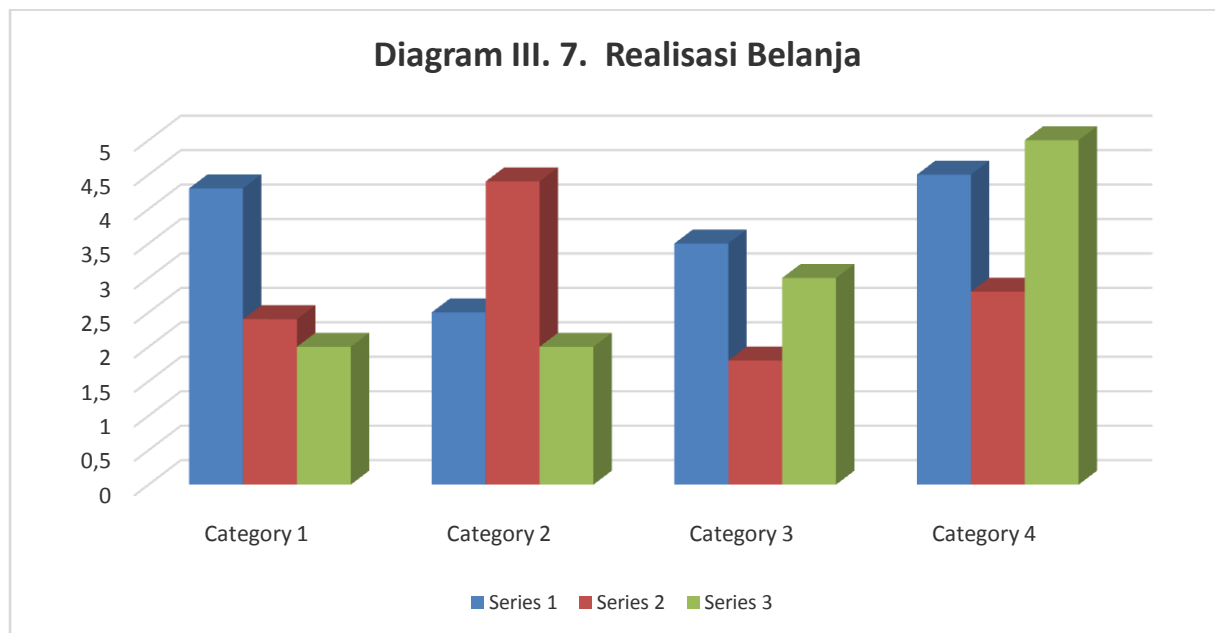
- a. Meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan manajemen pengelolaan pendapatan serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
- c. Meningkatkan kualitas SDM aparat pengelola PAD melalui kursus, bimbingan teknis, widyaloka, seminar dan studi banding.

2. Realisasi Belanja

Realisasi belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung sebesar Rp.7.240.209.784,00 atau 83,22 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.**8.700.434.485,00** dengan rincian :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Tidak Langsung				
	- Belanja Pegawai	2.581.139.193,00	1.913.659.328,00	667.479.865,00	74,14
2.	Belanja Langsung				
	Belanja Pegawai	314.584.200,00	178.385.000,00	667.479.865,00	56,71
	-				

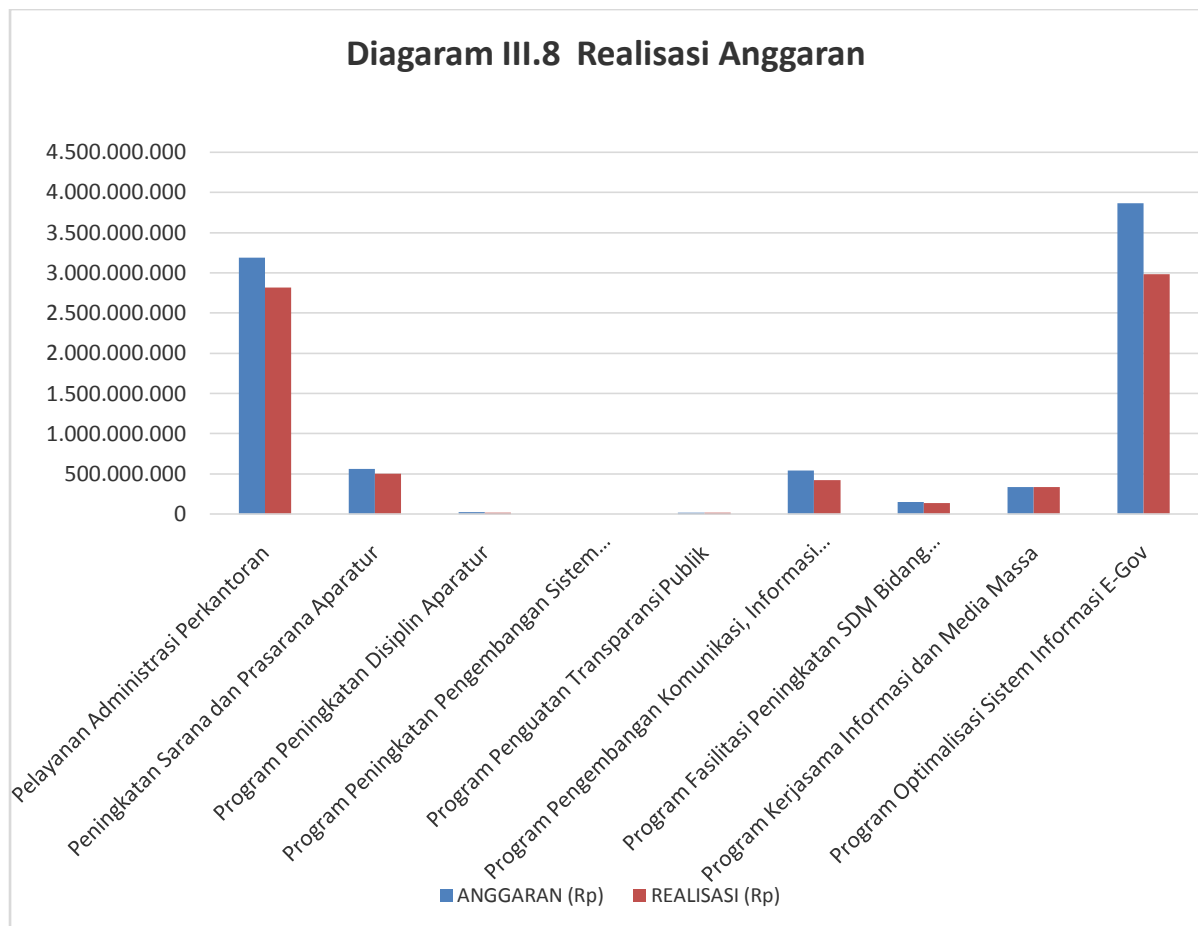
	- Belanja Barang/Jasa	4.617.131.575,00	3.663.301.484,00	953.830.091,00	79,34
	- Belanja Modal	3.756.468.120,00	3.398.523.300	370.195.410,00	90,18
	Jumlah	8.700.434.485,00	7.240.209.784,00	1.460.224.701,00	83,22



Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%

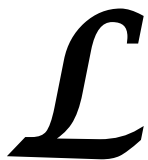
		(Rp)		(Rp)	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.185.947.450	100	2.814.662.246,00	88,35
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	564.370.000,00	100	506.460.700,00	89,74
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.000.000,00	100	22.090.000,00	92,04
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	100	0,00	100
5.	Program Penguatan Transparansi Publik	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100
6.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	544.952.700,00	100	423.668.475,00	77,74
7.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	155.441.125,00	100	141.168.475,00	87,24
8.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	339.957.900,00	100	338.697.900,00	99,63
9.	Program Optimalisasi Sistem Informasi <i>E-Gov</i>	3.865.765.310,00	100	2.979.022.686,00	77,06
JUMLAH		8.307.757.860,00	100	7.548.438.495,00	83,22



Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : realisasi tidak melebihi anggaran. Selain itu berdasarkan skala pengukuran ordinal realisasi dari pelaksanaan seluruh program bisa dikatakan berhasil.

BAB IV

PENUTUP



aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun 2017 ini, merupakan bentuk laporan dan pertanggung-jawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Laporan Kinerja Tahunan melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan dengannya, yaitu APBD dan Arah Kebijakan Umum (AKU) bidang kominfo yang dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017.

Berdasarkan dokumen tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tahun 2017 melaksanakan 9 (sembilan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan untuk mencapai sasaran strategis pada misi dinas dalam rangka mewujudkan visi dinas yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Memperluas jaringan pelayanan komunikasi dan informatika yang mampu menjangkau seluruh wilayah terutama daerah-daerah sentra produksi, wisata dan peningkatan SDM di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sasaran yang menjadi perhatian utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan akuntabilitas kelembagaan yang didukung kualitas SDM yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi;
- Memperluas jaringan pelayanan komunikasi dan informatika yang mampu menjangkau seluruh wilayah terutama daerah-daerah sentra produksi dan wisata;

Program-program dari sasaran I yang termasuk dalam kategori **berhasil** adalah :

- Program pelayanan administrasi perkantoran;

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program peningkatan disiplin aparatur;
- Program penguatan transparansi publik.

Program – program dari sasaran **2** termasuk dalam kategori **berhasil** adalah :

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.

Program – program dari sasaran **3** termasuk dalam kategori **berhasil** adalah :

- Program Optimalisasi Sistem Informasi E-Gov;
- Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah di tuangkan dalam RKA-SKPD / DPA-SKPD / DPPA-SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 8.700.434.485,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.240.209.784,00 atau 83,22 % dari *plafond* anggaran.

Berdasarkan nilai capaian sasaran, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang telah berhasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya upaya keras dari seluruh aparat Dinas Komunikasi dan Informatika serta dukungan dan partisipasi insan kominfo maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian capaian tersebut dirasa belum optimal baik dari sisi perencanaan maupun sisi pelaksanaan program kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi, diantaranya :

- Personil yang memiliki kualifikasi teknis yang dipersyaratkan belum mencukupi dari kebutuhan;
- Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, terhadap peranan komunikasi dan informatika;
- Masih kurangnya kompetensi aparatur di bidang komunikasi dan informatika;
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM terutama dalam pelaksanaan pengembangan aplikasi.

Dalam upaya mengoptimalkan capaian sasaran tahun 2017 dan mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang langkah–langkah yang telah dan akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana diatasi dengan memanfaatkan yang ada secara maksimal;
2. Dalam tugas – tugas operasional lapangan dan atau penertiban, penugasan staf tidak terbatas hanya dari satu bidang saja tetapi melibatkan staf dari bidang lain dan sekretariat;
3. Memberi kemudahan bagi staf Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan/penyediaan sarana seperti pembangunan menara bersama, CCTV publik;
5. Terus berupaya untuk mewujudkan realisasi pembangunan *control room* Pemerintah Kota Singkawang;
6. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten lain (sekitar) dibidang Komunikasi dan Informatika maupun Bidang E-Gov dan Telematika dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat.

Dinas Komunikasi dan Informatika mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang didasarkan atas keikhlasan sangat kami harapkan untuk dapat mewujudkan Kota Singkawang sebagai ***"KOTA SINGKAWANG SEBAGAI KOTA PARIWISATA, PERDAGANGAN, JASA DAN AGRO INDUSTRI"***.

Singkawang, Februari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs. AHYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631123 199003 1 003